

FILOSOFI DALAM AKSIOMA MULTIKULTURAL MASYARAKAT HINDU BALI

Oleh: I Putu Suardipa

DOSEN STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA

ABSTRAK

Keberagaman budaya Indonesia berimplikasi pada keragaman pola tatanan hidup bermasyarakat. Masyarakat Bali khususnya memiliki keanekaragaman *culture* baik dari segi agama, dresta, pola hidup yang hampir berbeda di setiap daerah. Keberagaman tersebut menjadikan mereka memiliki karakter multikulturalisme kental bersifat aksioma mencakup kepercayaan, gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikap dan tindakan masyarakat yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kekerabatan yang sama dan mempunyai kebanggan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. Kajian filosofis dalam konteks aksioma multikultural pada masyarakat bali ini memberikan perspektif baru dalam menelaah sebuah keberagaman sosial dan pola kehidupan yang berbeda disetiap daerah di bali, menjadikan masyarakat bali yang madani dalam sistem sosial kemasyarakatan yang utuh. Kata Kunci : Filosofi, Multikultural, Masyarakat

ABSTRACT

The diversity of Indonesian culture has implications for the diversity of social order patterns. Balinese people in particular have a diversity of cultures both in terms of religion, dresta, lifestyle that is almost different in each region. The diversity makes them have a thick character of axiomatic multiculturalism that includes beliefs, ideas, worldviews, policies, attitude and actions of a pluralistic society in terms of ethnicity, culture, religion and so on, but have the aspiration to develop the same spirit of kinship and have pride to maintain the plurality. The philosophical study in the context of multicultural axioms in Balinese society provides a new perspective in examining a different social and lifestyle in each region of Bali, making Balinese civil society a complete social system.

Keywords: Philosophy, Multicultural, Society

I. PENDAHULUAN

Keberagaman budaya Indonesia berimplikasi pada keragaman lain yang ada pada tatanan hidup masyarakat yang terhimpun dalam suatu ideologi yaitu Pancasila. Konsep keberagaman suku, ras, pola *culture* dan agama menuntut penguasaan masyarakat terhadap pentingnya komunikasi multikultural di masyarakat. Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme berasal dari dua kata; *multi* (banyak/beragam) dan *cultural* (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi berarti keberagaman budaya. Budaya yang mesti dipahami, adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain-lain. Kosep tentang multikulturalisme, sebagaimana konsep ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang tidak bebas nilai (*value free*), tidak luput dari pengayaan maupun penyesuaian ketika dikaji untuk diterapkan. Demikian pula ketika konsep ini masuk ke Indonesia, yang dikenal dengan sosok keberagamannya. Muncul konsep multikulturalisme yang dikaitkan dengan

isme religius” yang menekankan tidak terpisahnya agama dari negara, tidak mentolerir adanya paham, budaya, dan orang-orang yang atheis (Azra : 2006). Dalam konteks ini, multikulturalisme dipandang sebagai pengayaan terhadap konsep kerukunan umat beragama, suku ras dan pola kebudayaan yang dikembangkan secara nasional untuk negara Indonesia pada umumnya.

Multikulturalisme masyarakat Bali sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki keberagaman *culture*. Multikulturalisme masyarakat Bali berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu pada daerah tertentu. “Multikulturalisme” pada dasarnya adalah pandangan umum yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap aksioma (kebenaran tanpa pembuktian) dalam konteks keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat setempat dalam hal ini masyarakat Bali. Dipihak lain multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain (Lawrence Blum, dikutip Lubis, 2006:174). Kajian filosofis multi-kultural pada masyarakat Bali ini memberikan perspektif baru dalam menelaah sebuah keberagaman sosial dan pola kehidupan yang berbeda disetiap daerah di Bali, menjadikan masyarakat Bali yang madani dalam sistem sosial kemasyarakatan.

II PEMBAHASAN

2.1. Kajian Filosofi Agama Hindu dalam Masyarakat

Kajian filosofi dalam hal ini menuntut kemampuan kita mengkaji segala hal dalam konteks filsafat kemasyarakatan dengan pemikiran yang sepenuhnya menggunakan kekuatan akal dan kemampuan nalar, yang secara murni diterapkan untuk menelaah pemmasalahan alam modern masyarakat. Tujuan berfilsafat menurut Palmquist (2002:52) berasal dari pengakuan kebalan hingga meraih cinta kealiman dan dari rasa takjub berkeheningan hingga memperoleh pemahaman tentang kata-kata pada masyarakat umumnya. Metafisika misalnya, dapat mengajarkan perbedaan antara hal-hal yang bisa diketahui dan yang tidak bisa diketahui. Hanya jika telah mempelajarinya, keberanian memasuki wilayah logika telah siap dalam kematangannya karena logika akan mengajarkan pemahaman tentang kata-kata. Segera setelah memiliki pondasi teoretis ini penerapan pemahaman baru ini dapat digunakan menggapai kebenaran dan pengetahuan yang relevan dengan kehidupan manusia. Mencari “ilmu sejati” inilah yang disebut cinta kealiman. Dengan mencintai kealiman maka penyelidikan pada tahapan berikutnya tanpa tersesat dalam kawasan yang menakutkan bisa dilanjutkan sehingga melahirkan sikap yang sungguh-sungguh takjub berkeheningan dalam kepercayaan bermasyarakat.

Secara singkat dijelaskan sejarah pelaku filsuf terkenal yang menuntun

kita dengan karyanya seperti : Filsafat Barat melalui banyak guru filsafat terkenal, sejak Thales di Militos dan Pythagoras sampai dengan Empedocles dan Plato; dari Plotinus dan para pemikir Neoplatonik sampai dengan mistikus-mistikus Abad Pertengahan; dan kemudian pada Spinoza dan Hegel, bergulat dengan masalah-masalah yang melampaui wilayah akal sehat, yang hanya bisa diungkapkan dalam rumusan yang sulit dan samar, dan dengannya paradoks. Filsafat telah berhasil dan sangat berjasa membangun dunia empiris yang sempurna, tetapi meninggalkan begitu banyak ruang kosong bagi sastra-sastra agama, keyakinan, dan kepercayaan. Mengingat filsafat dan mitos merupakan dua objek yang sama dalam perbedaannya. Hal ini terbentang dalam keseluruhan sejarah pemikiran Barat, yang diawali sejak masa kosmosentris dan teosentris hingga ke antroposentris. Para pemikir Timur sama sadarnya dengan para pemikir Barat atas fakta bahwa kekuatan akal dan kemampuan nalar (baca: *logos*) tidak cukup untuk menuntaskan masalah-masalah tersebut guna mengungkapkan kebenaran. Sebagaimana Rene Descartes dengan “*cogito ergo sum*” -nya menyangsikan secara radikal segala sesuatu, ada. Berpikir itu dibatasi oleh bahasa, dan karenanya lebih banyak menyisakan ruang kosong terbuka. Berpikir itu semacam berbicara di dalam diri tanpa suara, tidak bisa dirumuskan dalam kata-kata atau simbol-simbol, karena itu tradisi yang ada tidak eksis dalam proses berpikir. Oleh karenanya diperlukan akal yang kreatif, khusus,

cerdas, dan berani untuk menembus apa yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Dengan demikian muncul permukaan sebuah analisis dalam penerimaan penuh terhadap apa yang disebut intuisi. Seluruh raga disertakan melalui disiplin diri dalam olah rasa, olah-hasrat, olah-niat, olah-akal, olah-budi, dan olah-cipta-rasa-karsa yang permanen sebagaimana dikenal di dalam disiplin yoga. Dengan tradisi yoga ini, filsafat India menjadi sebuah mental praktis dan disiplin fisik untuk mewujudkan kehidupannya melalui bangkit dan hidupnya akal pikiran. Filsafat Hindu menyelidiki alam, dicari intisarinya, diselami hakikatnya, dicari sebab-sebab yang sedalam-dalamnya, akan tetapi tidaklah berhenti di situ saja, masih mempunyai tujuan lebih lanjut: kebebasan (Poedjawijatna, 1986:54).

Persoalan kebebasan, kebenaran, hakikat alam, dan kemanusiaan termasuk moral Hindu banyak diuraikan dalam Kitab Suci Weda. Menurut keyakinan Hindu isi kitab ini diwahyukan oleh Tuhan (walaupun beberapa pemikiran filosofis India, seperti Mimamsa menolaknya) melalui para resi, para brahmana, dan para guru. Pewahyuan itu terjadi secara langsung di dalam hati sanubari para resi atau para brahmana atau para guru tadi tentang kejadian-kejadian yang sedang dihadapi. Misalnya, kejahatan, baik alam maupun moral, seperti berakena-ragam bencana alam, malapetaka keyakinan, dehumanisasi, kemerosotan dan keruntuhan moral, terancamnya keselamatan, dan lain-lainnya; sebagaimana juga banyak diwejangkan

oleh Bhagawan Sri Krsna, sang avatara dalam Bhagavadgita. Jadi, “orang Hindu” berfilsafat lebih dimotivasi oleh kenyataan bahwa hidup adalah keterikatan yang menyebabkan penderitaan; dan penderitaan itu harus dilenyapkan; tujuannya adalah untuk mencapai kebebasan, realisasi diri yang terdalam, kesempurnaan. Sebagaimana halnya filsafat Barat, pusat pemikiran filosofis dalam Hindu, juga diawali dengan mendalami hakikat alam semesta, prinsip mutlak segala sesuatu, hakikat hidup dan kehidupan, atman dan brahman, dan hakikat manusia sebagai prinsip hidup, tindakan dalam berlimpahnya ruang dan waktu. Demikianlah Weda, wahyu Tuhan, mengajarkan hakikat hidup dan tujuan hidup serta cara-cara menjalankan hidup yang benar dimulai dari pengertian mendalam tentang alam semesta melalui berbagai manifestasi dewa-dewa. Bertolak dari sebuah regenerasi penganut, hal itu dimungkinkan, sebab pada kenyataannya di masyarakat, tidak pernah ada pemikiran yang stagnan atau melompat dalam jarak yang terlampau jauh antara satu generasi dan generasi berikutnya. Setiap pemikiran dalam suatu bangsa senantiasa mengalir inheren dalam kebudayaan dan peradaban masyarakat suatu bangsa. Setiap dekade memiliki ciri-ciri sebagai tanda, bahkan menjadi simbol generasi bersangkutan. Generasi pemikir berikutnya, yang terkemudian, senantiasa mengalirkan esensi pemikir-an sebelumnya, karena itu tidak ada pemahaman yang terputus-putus dan terpisah-pisah secara tegas dalam kepastian ruang dan waktu dalam kajian

kemasyarakatan. Mengingat segala tindakan terikat di dalam ruang dan tergantung pada waktu, yang membatasi segala upaya penyelidikan dan petualangan yang semestinya kita lakukan dalam pola kehidupan dan kemasyarakatan.

2.2. Filosofi Multikultural Masyarakat

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan, kebudayaan dalam perspektif ini sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Yang juga harus kita perhatikan bersama untuk kesamaan pendapat dan pemahaman adalah bagaimana kebudayaan itu operasional melalui pranata-pranata sosial. Pengertian tentang multi-kulturalisme memiliki dua ciri utama: pertama, kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*), kedua, legitimasi keanekaragaman budaya atau pluralisme budaya. Parsudi Suparlan menuliskan, Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku-bangsa atau kebudayaan suku-bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme akan harus mau tidak mau akan juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas (Suparlan, 2002).

Multikulturalisme lahir dari benih-benih konsep yang sama dengan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip etika dan moral egaliter sosial-politik (Suparlan, 2002).

Parekh membedakan lima model multikulturalisme:

- a) *Multikulturalisme isolasionis*, yaitu masyarakat yang berbagai kelompok kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal satu sama lain.
- b) *Multikulturalisme akomodatif*, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa.
- c) *Multikulturalisme otonomis*, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup

mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat yang semua kelompoknya bisa eksis sebagai mitra sejajar.

- d) *Multikulturalisme kritikal/ inter-aktif*, yakni masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus (*concerned*) dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif khas mereka.
- e) *Multikulturalisme kosmopolitan*, yaitu masyarakat plural yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan inter-kultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing (Azra, 2006).

Watak masyarakat multikultural adalah toleran. Mereka hidup dalam semangat *peaceful co-existence*, hidup berdampingan secara damai. Setiap entitas sosial dan budaya masih tetap membawa serta jati dirinya, tidak terlebur kemudian hilang, tetapi juga tidak diperlihatkan sebagai kebanggaan melebihi penghargaan terhadap entitas lain. Dalam perspektif multikulturalisme ini, baik individu maupun kelompok dari berbagai entitas etnik dan budaya hidup dalam societal

cohesion tanpa kehilangan identitas etnik dan kultur mereka. Masyarakat bersatu dalam ranah sosial tetapi antar-entitas tetap ada jarak. Jarak itu harus dijaga dengan komunikasi, dialog dan toleransi yang kreatif. Ada beberapa istilah lain yang secara konseptual tampak mirip dengan terminologi multikulturalisme tetapi sebenarnya beda, misalnya, diversitas, dan heterogenitas atau sering disebut juga dengan istilah “masyarakat majemuk”. Masyarakat majemuk (*plural society*) berbeda dengan keragaman budaya atau

multikultural (*plural culture*). Masyarakat majemuk lebih menekankan soal etnisitas atau suku bangsa yang pada gilirannya membangkitkan gerakan etnosentrisme dan etno-nasionalisme. Sifatnya sangat askriptif dan primordial. Bahaya chauvinisme sangat potensial. Karena wataknya yang sangat mengagungkan ciri stereotip kesukubangsaan, anggotanya memandang masyarakat lain dengan cara pandang seperti itu juga. Masyarakat majemuk dengan demikian selalu mengeram konflik dalam dirinya yang setiap saat siap memanifestasikan baik secara halus lewat kata-kata sindiran maupun secara kasar melalui tindakan kekerasan.

Pengakuan akan kesamaan derajat dari fenomena budaya yang beragam itu tampak dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ungkapan itu sendiri mengisyaratkan suatu kemauan yang kuat untuk mengakui perbedaan tapi sekaligus memelihara kesatuan atas dasar pemeliharaan keragaman, bukan dengan menghapuskannya atau

mengingkarinya. Perbedaan dihargai dan dipahami sebagai realitas kehidupan, hal ini adalah asumsi dasar yang juga melandasi paham multikulturalisme. Kita melihat kuatnya prinsip kesetaraan (*equality*) dan prinsip pengakuan (*recognition*) pada berbagai definisi multikulturalisme : Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekan-kannya penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multi-kultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan (Azra, 2002). Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. Lahirnya paham multikulturalisme berlatar belakang kebutuhan akan pengakuan (*the need of recognition*) terhadap kemajemukan budaya, yang menjadi realitas sehari-hari banyak bangsa, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sejak semula multikulturalisme harus disadari sebagai suatu ideologi, menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan penghargaan atas

kesetaraan semua manusia dan kemanusiaannya yang secara operasional mewujudkan melalui pranata-pranata sosialnya, yakni budaya sebagai pemandu kehidupan sekelompok manusia sehari-hari. Dalam konteks ini, multikulturalisme adalah konsep yang melegitimasi keanekaragaman agama, suku, ras dan pola budaya. Salah satu keunikan budaya Indonesia terdapat di daerah Bali. Di mata dunia, Bali dengan budayanya yang membumi sudah memiliki daya tarik wisata yang besar hal tersebut terlihat dari ciri khas setiap daerah di Bali memiliki daya tarik budaya, etnik pola budaya yang beragam dan menarik. Daerah Bali yang dalam hal ini menjadi kajian penulis dengan segenap keanekaragaman kulturenya terbentuk secara alami sebagai sebuah pola kemasyarakatan yang sudah membumi dan membudaya dengan daya tarik tersendiri.

2.3 Aksioma Multikultural Unik Masyarakat Hindu Bali

Masyarakat Bali memiliki keunikan multientis dan multimental dihadapkan pada dilematisme tersendiri, di satu sisi membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar sebagai multicultural nation-state, tetapi di sisi lain merupakan suatu ancaman. Maka bukan hal yang berlebihan bila ada ungkapan bahwa kondisi multikultural diibaratkan seperti bara dalam sekam yang mudah tersulut dan memanas sewaktu-waktu. Kondisi ini merupakan suatu kewajaran sejauh perbedaan disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi

dengan toleransi. Namun, ketika perbedaan tersebut mengemuka dan menjadi sebuah ancaman untuk kerukunan hidup, hal ini dapat menjadi masalah yang harus diselesaikan dengan sikap yang penuh toleransi. Problem tentang rawan terjadi konflik pada masyarakat multikultur seperti masyarakat Bali yang multikultural, memiliki potensi yang besar terjadinya konflik antarkelompok, etnis, agama, dan suku bangsa. Salah satu indikasinya yaitu mulai tumbuh suburnya berbagai organisasi kemasyarakatan, profesi, agama, dan organisasi atau golongan yang berjuang dan bertindak atas nama kepentingan kelompok yang mengarah pada konflik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) (Haris, H : 2012).. Agar dapat mengenal lebih dekat dan mendetail budaya Bali yang beragam , perlu juga mengetahui budaya yang berlaku secara umum baik dari segi tingkah laku (kelakuan) maupun benda-benda (tanda budaya) lainnya untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi suatu perbedaan. Konsep desa, kala, patra, dan kuna dresta, maupun desa/drsta mawa cara, adalah prinsip yang sampai saat ini masih berlaku bahkan oleh komunitas maupun lembaga-lembaga terkait cenderung untuk dipertahankan. Keragaman budaya yang ada/ dimiliki oleh masing-masing komunitas desa pekraman telah memperkaya dan memberi keindahan tersendiri bagi masyarakat Bali. Bentuk budaya “baru” dari keragam-an komunitas terhadap penggunaan sarana keagamaan seperti; umbul-umbul, kober, bandrangan, tumbak,

mamas, payung pagut, payung robrob, Penawesange, dan Dwaja tidak terlepas dari adanya interaksi dan internalisasi pendukungnya. Secara kultur keragam-an budaya berada dalam ruang interaksi dan internalisasi nilai-nilai yang memiliki pandangan berbeda, bahwa kolektivitas atau komunitas menentukan anggotanya, pandangan lainnya adalah anggota menentukan kebersamaan. Sejalan dengan pendapatnya Mudji Sutrisno, tentang timbulnya budaya baru dalam kehidupan masyarakat khususnya tentang keseragaman dalam keragaman sarana upacara keagamaan tidak lepas dari keinginan dan rasa tanggung jawab untuk melestarikan tradisi yang sesuai dengan jiwa jamannya. Sudah tentu pula dalam upaya pelestarian nilai-nilai sakral religius magis tersebut dibarengi dengan kondisi perkembangan jaman yang ada.

Adanya kemajuan teknologi, dominasi budaya, serta dinamika terpadu telah membentuk komunitas yang terwujud bukan oleh lingkungan tempat lingkungan itu berada. (David Kaplan dan Albert A. Manners, 1999: 241-242). Jadi budaya itu memang tidaklah statis, dapat bertahan dan berkembang sesuai dengan jamannya. Bali yang sarat dengan prosesi ritual religius keagamaan sekaligus sebagai daerah tujuan wisata secara tidak langsung telah bersentuhan dengan budaya baru sesuai adat kebiasaan daerah/negaranya masing-masing. Atau atas kemauan masyarakat/komunitas pramuwisata yang dengan “sengaja” memanjakan para wisatawan dengan

menyajikan seni budaya yang mengandung nilai sakral sebagai daya tariknya. Tidak jarang belakangan ini dijumpai sarana upacara keagamaan yang lengkap dengan atributnya berada di tempat-tempat umum.

Dalam transformasi kebudayaan Bali, I Wayan Geriya mengungkapkan, perubahan bentuk kebudayaan berimplikasikan dan mempunyai aspek yang sangat besar dan luas. Cakupan itu tidak saja berupa dimensi, cara, jaringan relasi fungsional, juga struktur yang terkait dengan pembesaran skala secara horizontal dan vertikal, tanpa meninggalkan esensi jati diri kebudayaan yang berkelanjutan. Lebih lanjut dianalogikan seperti kupu-kupu dengan proses transformasi biologisnya, dari perubahan telur menjadi ulat, kepompong hingga menjadi kupu-kupu yang dapat terbang bebas karena ada perubahan bentuk dan fungsi, namun tetap dalam esensi spesiesnya, tidak berubah ke spesies burung maupun yang lainnya. (Geriya, 2000 : 109). Apa yang diungkapkan dalam transformasi budaya memang sulit dihindari, namun dalam penelitian ini adanya simbol-simbol/atribut keagamaan yang digunakan ditempat ibadah dan disakralkan digunakan ditempat lainnya/diluar pura.

Kronologis multikultural pada kebudayaan Bali, kalau ditinjau dari persepektif historis, dapat dirunut menjadi tiga tradisi pokok, yaitu tradisi kecil, tradisi besar, dan modern. Tradisi kecil yang dimaksud adalah kebudayaan yang berorientasikan Bali lokal dengan ciri-ciri tertatanya sistem

pengairan oleh kelompok-kelompok organisasi nonformal yang disebut subak dan berternak dengan tujuan untuk keperluan upacara maupun memenuhi kebutuhan keluarga serta membuat barang-barang / peralatan rumah dan sarana keagamaan. Dalam tradisi besar telah terjadinya akulturasi antara kebudayaan Bali lokal dengan kebudayaan Hindu Jawa yang melahirkan kebudayaan Bali tradisi. Ciri-cirinya adalah adanya kekuasaan terpusat lewat konsep Dewa Raja. Raja dianggap sebagai inkarnasi Dewa dengan segala kelebihanannya dibandingkan rakyat kebanyakan (Geriya, 2000 : 2).

Terbentuknya multikultural pada kebudayaan Bali diikuti akulturasi tradisi terjadinya sistem penanggalan (kalender Hindu-Jawa) arsitek dan kesenian yang bermotif Hindu dan Budha. Kebudayaan Bali tradisi ini sebuah refleksi dari budaya ekspresif, dominannya nilai religius, nilai estetis dan solidaritas, sebagai inti kebudayaan Bali. Perbedaan antara bagian inti suatu kebudayaan dengan bagian perwujudan lahirnya, dapat dilihat dari beberapa ciri seperti yang ada pada inti kebudayaan misalnya: 1). Sistem nilai, 2). Keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, 3). Adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, 4). Adat mempunyai fungsi yang terjaring dalam masyarakat, sedangkan bagian akhir dari suatu kebudayaan fisik, alat-alat, benda-benda yang berguna, ilmu pengetahuan, tata cara dengan segala tekniknya, untuk memberi kenyamanan. (Koentjaraningrat, 1990:

97). Bagian akhir dari terbentuknya kebudayaan yaitu kebudayaan fisik, oleh masyarakat Bali masih terpelihara dan dirawat dengan baik. Kiat-kiat perawatan dan pelestarian warisan tersebut dilakukan dalam bentuk upacara ritual yang disebut dengan *otonan* atau *odalan* yang datangnya enam bulan sekali / 210 hari sekali. Khusus bagi masyarakat Hindu di Bali, selain diwariskan kebudayaan berbentuk fisik, yang lebih berharga dan bermanfaat adalah adanya suatu tatanan dan tuntunan “wajib” cara-cara atau alokasi waktu perawatan / pemeliharaan secara berkelanjutan sebagai warisan budaya.

Kondisi alam seperti itu disertai pula oleh sedikit perbedaan antara penduduk pegunungan dengan dataran rendah. Dimana penduduk dataran tinggi jumlahnya lebih sedikit dan agak terpengaruh oleh kebudayaan luar, disamping bahasanya yang memang sedikit berbeda dengan bahasa orang Bali pada umumnya. Kelompok masyarakat di pegunungan ini lebih suka disebut sebagai orang Aga atau Bali Aga. Untuk membedakannya maka orang Bali yang lebih terpengaruh oleh agama Hindu disebut sebagai orang Bali Hindu. Jumlah populasi suku bangsa Bali secara keseluruhan pada tahun 2014 adalah sekitar 4,225 juta jiwa. Orang Bali Hindu tersebar hampir di seluruh dataran Bali. Bahasanya sendiri terbagi dalam beberapa dialek, yaitu : dialek Buleleng, Karangasem, Klugkung, Bangli, Gianyar, Badung, Tabanan dan Jembrana. Bahasa Bali Hindu mengenal 3 tingkatan pemakaian bahasa, yaitu bahasa Alus, Lumrah

(Madya) dan Bahasa Bali Kasar, berbeda dengan bahasa Bali Aga yang hampir tidak mengenal tingkatan seperti itu. Akan tetapi sekarang bahasa Bali Alus digunakan secara resmi oleh hampir semua golongan dalam pergaulan di daerah Bali sendiri.

Sistem garis keturunan dan hubungan kekerabatan orang Bali berpegang kepada prinsip patrilineal (*purusa*) yang amat dipengaruhi oleh sistem keluarga luar patrilineal yang mereka sebut *dadia* dan sistem pelapisan sosial yang disebut *wangsa* (*kasta*). Sehingga mereka terikat ke dalam perkawinan yang bersifat endogami *dadaia* dan atau endogami *wangsa*. Orang-orang yang masih satu kelas (*tunggal kawitan*, *tunggal dadia dantunggal sanggah*) sama-sama tinggi tingkatannya. Dalam perkawinan endogami *klen* dan *kasta* ini yang paling ideal adalah antara pasangan dari anak dua orang laki-laki bersaudara.

Masyarakat Hindu Bali memang terbagi ke dalam pelapisan sosial yang dipengaruhi oleh sistem nilai yang tiga, yaitu utama, madya dan nista. *Kasta* utama atau tertinggi adalah golongan Brahmana, *kasta* Madya adalah golongan Ksatria dan *kasta* nista adalah golongan Waisya. Selain itu masih ada golongan yang dianggap paling rendah atau tidak berkasta yaitu golongan Sudra, sering juga mereka disebut *jaba wangsa* (tidak berkasta). Dari kekuatan sosial kekerabatannya dapat pula dibedakan atas *klen pande*, *pasek*, *bugangadan* sebagainya.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Bali sehari-hari hampir semuanya dipengaruhi oleh keyakinan

mereka kepada agama Hindu Darma yang mereka anut sejak beberapa abad yang lalu. Oleh karena itu studi tentang masyarakat dan kebudayaan Bali tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sistem religi Hindu. Agama Hindu Darma atau Hindu Jawa yang mereka anut mempercayai Tuhan Yang Maha Esa dalam konsep Tri Murti, yaitu Tuhan yang mempunyai tiga wujud: Brahma (Pencipta), Wisnu (Pelindung) dan Syiwa (Pelebur Segala yang Ada). Selain itu ada pula beberapa tokoh Dewa yang lebih rendah. Semuanya perlu di hormati dengan mengadakan upacara dan sesajian. Mereka juga menganggap penting konsepsi tentang Roh abadi yang disebut Athman, adanya buah setiap perbuatan (Karmapal), kelahiran kembali sang jiwa (purnabawa) dan kebebasan jiwa dari kelahiran kembali (moksa). Dalam menyelenggarakan pemakaman anggota keluarga orang Bali selalu melaksanakan tiga tahapan upacara kematian. Pertama, upacara pembakaran mayat (ngaben), kedua, upacara penyucian (nyekah) dan ketiga, upacara ngelinggihang. Ajaran-ajaran di agama Hindu Darma itu termaktub dalam kitab suci yang disebut Weda. Pola perkampungan/ permukiman orang Bali dari segi strukturnya dibedakan atas 2 jenis, yaitu : Pertama, pola per-kampungan mengelompok padat, pola ini terutama terdapat pada desa-desa di Bali bagian pegunungan. Pola perkampungan di desa-desa ini bersifat memusat dengan kedudukan desa adat amat penting dan sentral dalam berbagai segi kehidupan warga desa tersebut. Kedua, pola perkampungan

menyebar, pola ini terutama terdapat pada desa-desa di Bali dataran, dimana baik wilayah maupun jumlah warga desa disini jauh lebih luas dan lebih besar dari desa-desa pegunungan. Desa-desa di Bali dataran yang menunjukkan pola menyebar terbagi lagi dalam kesatuan-kesatuan sosial yang lebih kecil yang disebut Banjar. Banjar disini pada hakekatnya adalah juga suatu kesatuan wilayah dan merupakan bagian dari suatu desa dengan memiliki kesatuan wilayah, ikatan wilayah, ikatan pemujaan, serta perasaan cinta dan kebanggaan tersendiri.

Tata kehidupan masyarakat Bali khususnya di Kabupaten Gianyar, secara umum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : Sistem kekerabatan yang terbentuk menurut adat yang berlaku, dan dipengaruhi oleh adanya klen-klen keluarga; seperti kelompok kekerabatan disebut Dedia (keturunan), pekurenan, kelompok kekerabatan yang terbentuk sebagai akibat adanya perkawinan dari anak-anak yang berasal dari suatu keluarga inti. Sistem kemasyarakatan merupakan kesatuan-kesatuan sosial yang didasarkan atas kesatuan wilayah/territorial administrasi (perbekelan/kelurahan) yang pada umumnya terpecah lagi menjadi kesatuan sosial yang lebih kecil yaitu banjar dan territorial adat. Banjar mengatur hal-hal yang bersifat keagamaan, adat dan masyarakat lainnya. Dari sistem kemasyarakatan yang ada ini maka warga desa bisa masuk menjadi dua keanggotaan warga desa atau satu yaitu : sistem pemerintahan desa dinas sebagai wilayah administratif dan desa pakraman. Dari kehidupan masyarakat

setempat terdapat pula kelompok-kelompok adat yang heterogen namun bukan berarti dalam konteks tersebut lebih didominasi sebagai suatu perbedaan yang mengarah pada kesenjangan. Kesadaran akan perbedaan harus disikapi seperti tubuh manusia yang ketika salah satu bagiannya sakit yang lainnya akan ikut merasakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Richard Falk (dalam Kymlicka, 2002:183) yang memandang bahwa “keragaman masyarakat meningkatkan mutu hidup, dengan memperkaya pengalaman kita, memperluas sumber daya budaya”. Sejalan dengan hal tersebut, “Bagi Bung Karno keragaman etnis masyarakat Indonesia adalah suatu given. Keragaman sebagai given (pemberian) yang dapat bermakna bahwa keragaman merupakan rahmat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai modal yang oleh Falk dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan mutu hidup. Sujanto (2009:90) berpandangan bahwa Sasanti Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna persaudaraan atau perseduluran harus disosialisasikan kepada seluruh rakyat, melalui lembaga-lembaga yang sudah ada seperti lembaga pemerintah, swasta,

lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga kepemudaan, agar terbangun hidup yang rukun, damai, aman, toleran, saling menghormati, bekerjasama dan bergotong-royong dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

III. PENUTUP

Indonesia identik dengan keberagaman yang sudah menjadi warisan. Keberagaman budaya Indonesia berimplikasi pada keragaman lain yang ada pada tatanan hidup masyarakat yang terhimpun dalam suatu ideologi yaitu Pancasila. Konsep keberagaman suku, ras, pola *culture* dan agama menuntut penguasaan masyarakat terhadap pentingnya komunikasi multikultura di masyarakat. Masyarakat Bali khususnya memiliki keanekaragaman *culture* baik dari segi agama, dresta, pola hidup yang hampir berbeda di setiap daerah. Keberagaman tersebut menjadikan mereka memiliki karakter multikulturalisme kental bersifat aksioma (kebenaran tanpa pembuktian) mencakup kepercayaan, gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan masyarakat yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kekerabatan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. Kajian filosofis dalam konteks aksioma multikultural pada masyarakat Bali ini memberikan perspektif baru dalam menelaah sebuah keberagaman sosial dan pola kehidupan yang berbeda di setiap daerah di Bali, menjadikan masyarakat Bali yang madani dalam sistem sosial kemasyarakatan yang utuh agar terbangun hidup yang rukun, damai, aman, toleran, saling menghormati, bekerjasama dan bergotong-royong dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. 2002. *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 2006. "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme". Dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Bogor: Brighten Press. Jakarta: Rineka Cipta.
- Geriya, I Wayan. 2000. *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*. Denpasar: Unit Percetakan Bali.
- Haris, H. 2012. "Revitalisasi dan Reinterpretasi Pendidikan Pancasila: Upaya Mengatasi Fenomena Konflik Kekerasan Melalui Sektor Pendidikan" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Held, David et. al., 1999. *Global Transformations: Politics, Economic, and Culture*, Stanford, California: Stanford University Press.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta. Djambata
- Kymlicka, Will. 2002 *Kewargan Multikultur*. Terjemahan Edlina Hafmini Eddin. Jakarta : LP3ES.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2006. *Dekonstruksi Epistemologi Modern*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Palmquis, Stephen.2002. *Pohon Filsafat*. Pustaka pelajar:Yogyakarta
- Poedjawijatna, I.R. 1982.*Etika Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta : Bina Aksara.
- Suparlan, Parsudi. 2002. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural* Keynote Address Simposium III Internasional *Jurnal Antropologi Indonesia*, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16–19 Juli 2002.
- Sujanto, B. 2009. *Pemahaman Kembali Makna Bhineka Tunggal Ika (Persaudaraan dalam kemajemukan*. Jakarta: Sagung Seto.

